

**PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2009-2011**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**SRI WIJAYANTI**  
**NIM. 12030110151165**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sri Wijayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110151165  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2009-2011**  
Dosen Pembimbing : Hj. Siti Mutmainah, S.E.,M.Si.,Akt.

Semarang, 14 Agustus 2012

Dosen Pembimbing,

(Hj. Siti Mutmainah, S.E.,M.Si.,Akt.)

NIP. 19730803 200012 2001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Sri Wijayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110151165  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2009-2011**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 31 Agustus 2012**

Tim Penguji

1. Dr. Haryanto, S.E.,M.Si.Akt. (.....)
2. Surya Rahardja, S.E.,M.Si.Akt. (.....)
3. Hj. Siti Mutmainah, S.E.,MSi.,Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sri Wijayanti menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa sayamelakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Agustus 2012  
Yang membuat pernyataan,

Sri Wijayanti  
NIM. 12030110151165

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Syukurilah setiap kesulitan yang kamu dapat, karena terkadang kesulitan mengantarkan kita pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan

***Skripsi ini ku persembahkan untuk :***

***Kedua orang tuaku tercinta***

***Kakak dan Adikku tersayang***

***Semua sahabatku tersayang***

## ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Indikator yang dipakai untuk menjelaskan corporate governance dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, dan ukuran perusahaan.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Untuk menentukan sampel pilihan digunakan metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode ini maka didapatkan 19 perusahaan perbankan yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menunjukan bahwa ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan perbankan.

Kata Kunci : *Corporate Governance, Cash Flow Return On Asset (CFROA), Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan*

## ABSTRACT

*This study describes the relationship between corporate governance with financial performance on banking companies. The indicator used to explain corporate governance in this study consisted of the size of the board of directors, activities (meetings) the board of commissioners, institutional ownership, the proportion of independent commissioners, the number and size of the company's audit committee, and the size of the banking companies.*

*The method of analysis used in this study is multiple regression, because in accordance with the purpose of this study was to analyze the influence of independent variables on the dependent variables. Samples used in this study were all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2009-2011. To determine the selection of the sample used purposive sampling method. By using this method the company are obtained 19 banking companies that will be serve as samples in this study.*

*From the results of hypothesis testing in this study, it shows that the size of the board of directors, the activity of (meeting) the board of commissioners, proportion of independent commissioners, and the audit committee is negative effect and not significantly effect on the financial performance of banking companies. The results of this study also showed that institutional ownership is positive effect but not significantly effect on the financial performance of banking companies, and firm size have a positive effect and significantly effect on the financial performance of banking companies. Overall results show that corporate governance is less effect on the performance of the banking companies.*

*Keywords: Corporate Governance, Cash Flow Return On Asset (CFROA) and Financial Performance of Banking Companies*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualikum warohmatullahi wabarokatuh*

Puji Dan Syukur Atas Kehadirat Allah Swt Yang Telah Memberikan Segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011*”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa semester akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis maka perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala petunjuk, rahmat, dan karuniaNya lah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.d, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Hj.Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing atas waktu, perhatian dan bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dra. Hj. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
6. Para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis serta seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
7. Kedua orang tua ku yang tercinta (Bapak Sunoto dan Ibu Sri Wahyuni) atas segala doa, kasih sayang, dorongan, semangat, bimbingan, dan nasihat yang luar biasa dan tiada hentinya. Kakak dan adikku tersayang (Suharsono, Ellyda Hendrawati, dan Edi Suharyono) yang senantiasa memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Spesial untuk Sandy Ria Adinengtyas atas segala doa, kasih sayang, perhatian, nasihat, serta semangat yang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Sahabat-sahabat terbaikku Nora Riyanti, Niyanti Anggitasari, Destriana Kurnia, Irma Lutfiana, Adita Widyastuti, Sinung Primastuti, Adib Amali, Doni Kusuma, Hatur Kurnia, Kartikasari, dan Maharani Dian Cempaka atas segala perhatian, dukungan, serta motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Untuk Jhonson Paruntungan Matondang atas segala kasih, perhatian, dukungan, semangat, serta motivasi yang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Keluarga besar KKN Desa Barukan Kecamatan Tenganan Salatiga atas segala dukungan dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, ilmu, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, nasihat, bimbingan, dan semangat kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, 14 Agustus 2012

Penulis

Sri Wijayanti

NIM. 12030110151165

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	13
2.1.1 Teori Keagenan .....	13
2.2 Pengertian dan Konsep Dasar Corporate Governance....	17
2.2.1 Pengertian Corporate Governance.....	17
2.2.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance .....	18
2.2.3 Manfaat dan Tujuan Corporate Governance.....	24
2.2.4 Peraturan tentang Corporate Governance .....	26

2.2.5	Penerapan Prinsip-Prinsip Corporate Governance Dalam Perusahaan Perbankan .....	31
2.3	Pengertian dan Konsep Dasar Kinerja .....	36
2.3.1	Pengertian Kinerja Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perbankan .....	36
2.3.2	Pengetahuan Dasar Perbankan .....	39
2.3.3	Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan .....	42
2.3.4	Tujuan Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan....	48
2.4	Penelitian Terdahulu .....	49
2.5	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	52
2.6	Perumusan Hipotesis.....	53
2.6.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan .....	53
2.6.2	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan .....	56
2.6.3	Pengaruh Aktivitas (rapat) Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	58
2.6.4	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan .....	61
2.6.5	Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	63
2.6.6	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	66

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	69
3.1.1	Variabel Independen.....	69
3.1.2	Variabel Dependen .....	71
3.1.3	Variabel Kontrol.....	71
3.2	Populasi dan Sampel .....	72
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	74

3.4	Metode Pengumpulan Data.....	75
3.5	Metode Analisis Data .....	75
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	75
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	76
3.5.3	Analisis Regresi.....	80
3.6	Pengujian Hipotesis.....	82

#### BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	88
4.2	Analisis Data.....	89
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	89
4.3	Uji Asumsi Klasik .....	95
4.3.1	Uji Normalitas .....	95
4.3.2	Uji Multikolinieritas .....	99
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	100
4.3.4	Uji Autokorelasi .....	101
4.4	Analisis Regresi .....	102
4.4.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	102
4.4.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	103
4.4.3	Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) .....	104
4.4.4	Pengujian Hipotesis .....	105
4.5	Pembahasan .....	108
4.5.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional (INST) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.....	109
4.5.2	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi (BOD) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan .....	111
4.5.3	Pengaruh Aktivitas (rapat) Dewan Komisaris (RDK) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.....	112
4.5.4	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen	

	(INDEP) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan .....	114
4.5.5	Pengaruh Jumlah Komite Audit (KA) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan .....	115
4.5.6	Pengaruh Ukuran Perusahaan Perbankan (SIZE) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.....	116
 BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan .....	118
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	119
5.3	Saran.....	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	123
	LAMPIRAN A .....	127
	LAMPIRAN B.....	129
	LAMPIRAN C.....	136

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Uji Durbin Watson ( <i>DW test</i> ).....	77
Tabel 4.1 Daftar Nama Perusahaan Perbankan Yang Menjadi Sampel Penelitian .....	89
Tabel 4.2 Pemilihan Sampel Penelitian .....	90
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	90
Tabel 4.4 Frekuensi Ukuran Direksi.....	92
Tabel 4.5 Frekuensi Aktivitas (rapat) Dewan Komisaris .....	93
Tabel 4.6 Frekuensi Jumlah Komite Audit .....	94
Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Awal).....	97
Tabel 4.8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Setelah Membuang <i>Outlier</i> .....	98
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	99
Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser .....	101
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi.....	102
Tabel 4.12 Hasil Uji F .....	103
Tabel 4.13 Nilai R dan Koefisien Determinasi .....	104
Tabel 4.14 <i>Output</i> Persamaan Regresi .....	105

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Uji Normalitas Awal .....	96
Gambar 4.2 Uji Normalitas Setelah Mengeluarkan <i>Outlier</i> .....	98
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	100

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A	Daftar Sampel Perusahaan ..... 127
LAMPIRAN B	Data Sampel Perusahaan ..... 129
LAMPIRAN C	Hasil Output SPSS ..... 136

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan kekayaan pemiliknya atau pemegang saham dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Untuk menilai kinerja perusahaan, maka dilakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari menganalisis laporan keuangan perusahaan, yaitu untuk menilai atau mengevaluasi suatu kinerja khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta menentukan strategi apa yang harus diterapkan pada periode berikutnya jika tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai.

Pentingnya penilaian kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan telah memacu pemikiran para pemimpin perusahaan, bahwa mengelola suatu perusahaan dalam abad informasi dengan sistem ekonomi yang bebas dan terbuka menjadi lebih kompleks. Semakin kompleksnya aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dengan memberikan prioritas terhadap perbaikan penerapan *corporate governance*, perusahaan-perusahaan dapat mengarah kepada peningkatan kinerja. Perusahaan yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan keyakinan pelanggan dan memperoleh kepercayaan dari pasar.

Monks dan Minow (2001) dalam Sam'ani (2008) mendefinisikan *corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan yang di dalamnya menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi, para pemegang saham, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

*Corporate governance* mulai menjadi pembahasan yang penting di Indonesia, yaitu setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Baik pemerintah maupun para investor berpendapat, bahwa lemahnya penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diberikan perhatian yang lebih terhadap penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penerapan *corporate governance* merupakan salah satu solusi yang cukup tepat untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Penerapan prinsip *corporate governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan, karena prinsip *corporate governance* dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia dapat terus bertahan di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi dan dapat bersaing secara global. Menurut Hardikasari (2011) dengan adanya penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan para

pemegang saham dan investor memperoleh keyakinan bahwa mereka akan mendapat *return* atas investasi yang ditanamkannya, karena dengan adanya penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan, perusahaan dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor.

Konsep *corporate governance* menurut Hardikasari (2011) bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui suatu supervisi dan *monitoring* kinerja manajemen perusahaan dan untuk menjamin akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan laporan keuangan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. *Corporate Governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat.

*Corporate governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin banyaknya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *corporate governance*. Begitu juga dengan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) antara lain peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum”, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”.

Penelitian mengenai efektivitas penerapan *corporate governance* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain : Sugiarta (2004), Wedari (2004), Wilopo (2004), Boediono (2005), Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Utama (2005) dalam Hardikasari (2011). Akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti lebih banyak dilakukan pada perusahaan yang telah listing di BEI (Bursa Efek Indonesia). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tidak mencakup perusahaan perbankan. Padahal perusahaan perbankan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan di industri perbankan tersebut.

Penerapan *corporate governance* juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan bank yang utama yaitu memobilisasi dana

dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu-lintas pembayaran. Selain itu bank juga berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan nasional telah merumuskan cetak biru, yang dikenal dengan Arsitek Perbankan Indonesia (API).

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang masih serba tak menentu mengakibatkan tingginya risiko suatu perbankan untuk mengalami kesulitan keuangan. Praktik-praktik yang kurang sehat menjadi penyebab terjadinya krisis di perbankan nasional, yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya penurunan kesehatan perbankan nasional secara keseluruhan. Masalah-masalah tersebut terkait dengan pilar keempat API yang menyangkut berbagai program untuk menciptakan industri perbankan yang kuat.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Di dalamnya terdapat enam pilar utama yang merupakan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan *corporate governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya, misalnya industri perbankan harus memenuhi kriteria *capital adequacy ratio* (CAR) minimum. Bank Indonesia didalam menentukan status suatu bank menggunakan laporan keuangan sebagai dasarnya.

Status suatu bank yang dimaksud adalah apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak. Di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai pengawas tunggal perbankan yang konsisten akan terus berupaya agar perkembangan sistem perbankan di Indonesia menuju ke arah sistem perbankan yang sehat dan kokoh. Sikap Bank Indonesia dan komitmennya untuk mendorong ke arah terciptanya sistem perbankan yang sehat dan kokoh berdasarkan standar internasional yang menjamin adanya pengakuan internasional terhadap seluruh perbankan di Indonesia dalam era globalisasi.

Dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai suatu kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 00 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pada bagian penjelasan mengenai tujuan laporan keuangan pada butir ke 12 disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Pada butir ke 13 disebutkan bahwa Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari

kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Dan pada butir ke 14 disebutkan bahwa laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi pada kenyataannya, angka laba yang terdapat di dalam laporan laba rugi sering dipengaruhi oleh metode akuntansi, sehingga arus kas (*cash flow*) mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Menurut Pradhono (2004) dalam Hardikasari (2011), arus kas (*cash flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

*Cash flow return on assets* (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett *et al.*, 2006).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengambil sampel dari populasi pada laporan keuangan perusahaan perbankan yang telah *go public* dari tahun 2009-2011. Pemilihan data tahun 2009-2011 bertujuan untuk mendapatkan data terbaru yang didasarkan pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang penerapan *corporate governance* yaitu peraturan bagi bank umum.

Penelitian tentang *corporate governance* memang telah banyak dilakukan oleh sebagian besar peneliti, tetapi penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada perusahaan-perusahaan non perbankan. Contohnya, penelitian oleh Yudha Pranata pada tahun 2007 dan penelitian oleh Erni Hidayah pada tahun 2007 yang lebih berfokus pada perusahaan publik di Indonesia, serta penelitian oleh Putri pada tahun 2006 yang lebih berfokus pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih difokuskan pada kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan mengambil judul:

**“ PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2009-2011 ”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan adalah jenis perusahaan yang mempunyai regulasi yang ketat bila dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria *capital adequacy ratio* (CAR) minimum. Laporan keuangan perusahaan perbankan digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai apakah bank tersebut termasuk dalam perusahaan yang sehat atau tidak. Keadaan yang seperti ini banyak dimanfaatkan oleh para manajer untuk melakukan manipulasi data dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab manajer tersebut masuk dalam kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Untuk meminimalisasi adanya manipulasi data oleh para manajer dan untuk mensejahterakan para pemilik dan pemegang saham, maka cara yang tepat digunakan adalah *corporate governance*.

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis dan kualitas kinerja yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan para *stakeholders* lainnya agar perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisien.

Pertanyaan penelitian dari perumusan masalah tersebut adalah apakah penerapan *corporate governance*, yang dalam penelitian ini mencakup indikator kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah penerapan *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia yang diukur menggunakan *Cash Flow Return On Assets* (CFROA).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *corporate governance* untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi perusahaan perbankan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

#### 2. Manfaat bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi dan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan.

### 3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada penulis mengenai pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

### 2. BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan, kajian penelitian-penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

#### 4. BAB VI HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

#### 5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Teori Keagenan ( Agency Theory)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan tentang corporate governance. Di dalam teori ini berisi tentang penjelasan mengenai hubungan antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Sari (2010), hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara *principal* dan *agent*. Inti dari hubungan keagenan ini adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Tujuan utama teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori keagenan (*agency theory*) juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Sebagai pengelola perusahaan, *agent* (manajer) perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *principal* (pemilik).

Oleh karena itu manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Menurut Ali (2002) dalam Sam'ani (2008), laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Asimetris informasi yang terjadi antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan informasi antara informasi yang sebenarnya dan tidak sebenarnya yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan adanya asimetri informasi antara *agent* (manajer) dengan *principal* (pemilik) akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manipulasi data yang terdapat di dalam laporan keuangan yang akan diperiksa oleh *principal* (pemilik), yang dimana manipulasi data yang dilakukan manajer tersebut bertujuan untuk menguntungkan kepentingan, baik untuk manajer itu sendiri maupun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Sam'ani (2008), terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Haris (2004) menyatakan bahwa berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia

kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

*Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*), yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan keyakinan para investor bahwa *agent* (manajer) akan memberikan keuntungan bagi mereka, keyakinan bahwa *agent* (manajer) tidak akan mencuri, menggelapkan bahkan menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para *agent* (manajer). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Industri perbankan adalah suatu industri yang sifat-sifatnya berbeda dengan industri lain seperti industri manufaktur, industri perdagangan, dan sebagainya. Perbedaan sifat-sifat yang terdapat dalam industri perbankan tersebut menyebabkan teori keagenan pada perusahaan perbankan mempunyai karakteristik sendiri. Perbankan adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, oleh sebab itu maka perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi. Risiko yang harus dihadapi oleh industri perbankan sangat besar. Industri perbankan diharuskan untuk selalu menjaga kualitas pelayanannya kepada seluruh masyarakat agar likuiditas bank tetap terjaga.

Dengan adanya regulasi yang terdapat di dalam industri perbankan tersebut, mengakibatkan hubungan keagenan yang terjadi di dalam industri perbankan berbeda dengan hubungan keagenan dalam industri lain yang tidak teregulasi (Ciancenelli & Gonzales, 2000 dalam Supriyatno, 2006).

Dalam teori keagenan, paling sedikit ada 3 asumsi yang mendasari (Ciancenelli & Gonzales, 2000 dalam Supriyatno, 2006), yaitu (1) pasar yang normal dan kompetitif, (2) *nexus* dari asimetri informasi adalah hubungan prinsipal-agen antara pemilik dan manajer, (3) struktur modal optimal menghendaki alat yang terbatas (*Miller & Modigliani theorems*). Jika asumsi-asumsi tersebut di atas diterapkan dalam perbankan, maka ketiga asumsi di atas tidak akan terpenuhi semua sebab bank sangat teregulasi sehingga tidak akan tercapai pasar yang normal dan kompetitif.

Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam industri perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer, dan regulator. Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan pasti melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain.

## 2.2 Pengertian dan Konsep Dasar *Corporate Governance*

### 2.2.1 Pengertian *Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006 mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Sedangkan menurut *Forum Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) 2001, *corporate governance* adalah sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

*Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan kepemilikan antara *principal* (pemilik) dengan pengendalian perusahaan oleh *agent* (manajer), atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* (pemilik) dengan pengendalian perusahaan oleh *agent* (manajer) dalam sebuah perusahaan, cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* (pemilik) dengan *agent* (manajer). Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak

mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Monks (2003) dalam Sam'ani (2008) menyatakan bahwa *good corporate governance* dapat diartikan pula sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan suatu nilai tambah untuk semua *stakeholder*.

Konsep *corporate governance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi dan monitoring kinerja manajemen perusahaan dan untuk menjamin akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan laporan keuangan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat.

### **2.2.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance***

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006, terdapat lima prinsip dalam *good corporate governance*. Kelima prinsip tersebut dikembangkan secara universal dengan alasan karena dapat digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem meliputi hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kelima prinsip tersebut dapat menjadi pedoman untuk perusahaan di semua negara namun, diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing. Adapun kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. *Transparency* (Keterbukaan)

*Transparency* adalah prinsip dimana perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip *transparency* menurut KNKG 2006 tersebut antara lain :

- 1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

1.3 Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

1.4 Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

*Accountability* adalah prinsip dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip *accountability* menurut KNKG 2006 tersebut antara lain :

2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

2.2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

- 2.3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 2.4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

### 3. *Responsibility* (Responsibilitas)

*Responsibility* adalah prinsip dimana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip *responsibility* menurut KNKG 2006 tersebut antara lain :

- 3.1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- 3.2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di

sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4. *Independency* (Independensi)

*Independency* adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip *independency* menurut KNKG 2006 tersebut antara lain :

4.1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

4.2 Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### 5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

*Fairness* adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman pokok pelaksanaan prinsip *fairness* menurut KNKG 2006 tersebut antara lain :

- 5.1 Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 5.2 Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 5.3 Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Dalam menerapkan kelima prinsip *corporate governance* tersebut, sebaiknya diimbangi dengan dilaksanakannya kode etik perusahaan. Selain itu, pedoman *corporate governance* juga penting dalam penerapan kelima prinsip tersebut, karena dengan adanya pedoman *corporate governance*, visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Pedoman *corporate governance* adalah sebuah pedoman yang disusun oleh komite nasional *corporate governance* yang mempunyai fungsi sebagai acuan kepada para pelaku usaha untuk menjalankan perusahaannya dengan menerapkan sistem *corporate governance* secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena dengan adanya penerapan sistem *corporate*

*governance* di dalam suatu perusahaan, maka dapat dijadikan tolak ukur perusahaan apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau tidak.

### **2.2.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance***

*Corporate governance* memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dalam suatu perusahaan, selain itu juga melalui kemampuan akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemakai kepentingan lainnya berdasarkan aturan-aturan yang telah berlaku. Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2001*, manfaat dari pelaksanaan *corporate governance* antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Sedangkan menurut IICG (2000), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah :

1. Meminimalkan *agency cost*.

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah *survey* yang dilakukan oleh *Russel Reynolds Associates* (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadangkala akan

menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

#### **2.2.4 Peraturan tentang *Corporate Governanace***

Di dalam pelaksanaan corporate governance terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaannya di perusahaan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

1. Peraturan dari Keputusan Menteri BUMN yang berisikan antara lain :
  - Kep-103/MBU/2002 tanggal 4Juni 2000 yaitu peraturan tentang pembentukan komite audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Yaitu bahwa komite audit bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.
  - Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 yaitu peraturan tentang penerapan *Good Corporate Governanace* pada BUMN yang mencabut Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No : Kep-23/M-PM.
  - PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 yaitu peraturan yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan *good corporate governanace* secara konsisten dan/ atau menjadikan prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya.
2. Peraturan dari Bank Indonesia yang berisikan antara lain :
  - Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 yaitu peraturan tentang Bank Umum, yang didalamnya diatur kriteria

yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank.

- Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 yaitu peraturan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and Proper Test*), dimana calon direksi dan komisaris bank harus memenuhi kompetensi tertentu untuk menjadi pengurus bank.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yaitu peraturan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003.

3. Peraturan dari Bapepam yang berisikan antara lain :

- Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu peraturan yang berkaitan dengan prinsip fairness dalam GCG yang mengisyaratkan adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham.
- Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan yaitu peraturan yang berkaitan dengan prinsip transparansi dari GCG, yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala.
- Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yaitu peraturan yang merupakan salah satu Peraturan Bapepem

yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan.

- Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Terbuka yaitu peraturan yang menunjukkan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas diterapkan.
- Peraturan Bapepam No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Perusahaan Publik dan Emiten yaitu peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Bapepam No.IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS yaitu peraturan yang memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk rencana RUPS.
- Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tentang Pengaturan tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yaitu menurut ketentuan ini pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tentang tata cara RUP, termasuk penggunaan hak suara.
- Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik yaitu peraturan yang dengan tegas mewajibkan emiten untuk menyampaikan kepada Bapepam dan

mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek, perusahaan, dan keputusan investor.

- Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yaitu peraturan yang memuat kewajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada publik.
- Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu peraturan yang memuat kewajiban untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih kepada otoritas pasar modal, bursa, dan public, serta memuat kewajiban untuk melakukan tender offer.
- Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender yaitu peraturan yang dalam hal terjadinya pembelian perusahaan terbuka, diwajibkan untuk melakukan tender offer, dimana peraturan ini memberikan bentuk yang lebih jelas berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka.
- Peraturan Bapepam No.VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan yaitu peraturan yang mengimplementasikan secara konkret prinsip akuntabilitas dan prinsip responsibilitas, karena memberikan gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para

direksi atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepam.

- Peraturan Bapepam No.X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit yaitu peraturan yang mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama apabila terhadap suatu perusahaan public dimohonkan pernyataan pailit.
- Peraturan Bapepam No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan yaitu peraturan yang mewajibkan emiten untuk membentuk fungsi sekretaris perusahaan ini adalah juga merupakan bentuk konkret implementasi prinsip keterbukaan, mengingat peranan utama dari sekretaris perusahaan adalah untuk menghubungkan antara perusahaan public atau emiten dengan para pemodal melalui pemberian informasi-informasi penting yang dibutuhkan sebelum menanam modal.
- Peraturan Bapepam No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan yaitu peraturan ini diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) bagi emiten dan perusahaan public terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris.

### **2.2.5 Penerapan Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* Dalam Perusahaan Perbankan**

Secara sepintas terlihat bahwa penerapan *corporate governance* di perusahaan perbankan tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. *Corporate Governance* pada lembaga keuangan, khususnya pada perusahaan perbankan memiliki keunikan bila dibandingkan *corporate governace* pada lembaga keuangan non perbankan. Dalam banyak perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan *corporate governance*.

Penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan perbankan dianggap unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non keuangan. Keunikan perusahaan perbankan terutama dilihat dari neraca yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi liabilitas adalah tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan terjadinya *mismatch* antara aktiva dan pasiva. Terjadinya *mismatch* dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank. Penyaluran kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu meminimkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya *moral hazard*.

Dalam perusahaan perbankan, *corporate governance* adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. *Good corporate governance* dirasakan semakin penting seiring dengan

meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pengelolaan risiko yang baik, bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Dalam setiap pengambilan keputusan bisnis memiliki unsur ketidakpastian dan juga menimbulkan risiko. Untuk menyikapi hal tersebut industri perbankan senantiasa mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari prinsip – prinsip corporate governance. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut. Aktualisasi *corporate governance* sebagai bagian yang dilakukan proses intern senantiasa melibatkan semua pihak *stakeholder* yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, pejabat senior, pimpinan dan seluruh karyawan. Interaksi tersebut membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing untuk setiap perusahaan perbankan.

Dalam melaksanakan *corporate governance*, perusahaan perbankan senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum memberikan definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

“Pertama transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga

pengelolaannya berjalan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Prinsip yang dianut adalah tata kelola perusahaan harus dijalankan dengan standar tertinggi dalam rangka mendukung tujuan bisnis bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan kunci utama yang mendukung keberlangsungan suatu bank.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha bank. Oleh sebab itu Dewan Komisaris dan Direksi suatu bank membuat komitmen bersama untuk menerapkan *sistem corporate governance* di dalam bank tersebut. Contoh upaya / kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip corporate governance yang telah dilakukan oleh salah satu bank di Indonesia yaitu PT. Bank Panin Tbk, antara lain sebagai berikut :

1. *Public Expose*

Kegiatan ini untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham, investor, analis, dan media.

2. *Road Show*

Untuk meningkatkan reputasi dan citra bank kepada para investor serta bank-bank koresponden internasional. *Road Show* dilakukan secara berkala baik secara bilateral ataupun ikut serta bersama perusahaan-perusahaan sekuritas.

3. Kepatuhan (*Compliance*)

Penyampaian laporan sesuai ketentuan kepada Bank Indonesia (BI) yang meliputi Laporan Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi *Cash Transaction Report (CTR)* dan *Suspicious Transaction Report (STR)*, laporan kepada BAPEPAM-LK yang meliputi Laporan keuangan Triwulanan, serta publikasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara berkala.

4. Paparan Rencana Bisnis dan hasil kinerja kepada Bank Indonesia

Hasil laporan pengawasan rencana bisnis secara berkala dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang rencana Bisnis Bank Umum.

5. *Rating Agencies*

Menunjuk Surat Edaran Nomor 10/30/DPNP Bank Indonesia tentang lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap aspek kuantitas maupun kualitas.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* antara lain peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan

peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum”, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”. Selain itu juga terdapat Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, yang di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, selain itu juga diatur tentang batasan transaksi yang diperoleh atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. Peraturan lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia No.5/21/DPNP yang berisi tentang kebutuhan peningkatan *corporate governance*. Dalam peraturan ini diatur tentang kewajiban suatu bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan juga tentang kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut. Pada intinya penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* minimal harus diwujudkan dalam :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- b. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.
- c. Penyediaan dana kepada pihak yang terkait dan penyediaan dana besar.

- d. Rencana strategis bank.
- e. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
- f. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
- g. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.

### **2.3 Pengertian dan Konsep Dasar Kinerja**

#### **2.3.1 Pengertian Kinerja Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perbankan**

Pengertian perusahaan menurut Perwirasari (2009) adalah suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu yang menjalankan suatu kegiatan dengan tujuan tertentu untuk memenuhi keinginan para anggotanya. Untuk menilai apakah tujuan suatu perusahaan telah tercapai atau tidak sangatlah tidak mudah, karena menyangkut aspek-aspek manajemen yang harus dipertimbangkan. Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dapat dinilai sudah benar dan sesuai dengan peraturan adalah melalui penilaian kinerja perusahaannya.

Pengertian kinerja menurut Sari (2010) adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Kinerja merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan. Menurut Morse dan Davis (1996); Hirsch (1994, h.594-607) (dalam Tugiman, 2000) pengukuran kinerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja *non* keuangan dan pengukuran kinerja keuangan. Kinerja *non* keuangan adalah faktor kualitatif yang mendukung kinerja keuangan yang bersifat kuantitatif. Pengukuran kinerja

keuangan mengarah kepada perbaikan, perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan strategis.

*Performance* atau kinerja menurut Lestari (2011) merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja juga dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi yang diukur dengan standar.

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk menilai kinerja perusahaan, maka dilakukan penilaian kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan merupakan suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan.

Secara umum kinerja dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja *non* keuangan. Kinerja *non* keuangan menurut Soegiharto (2007, hal.10) adalah faktor kualitatif yang mendukung kinerja keuangan yang bersifat kuantitatif. Pengukuran kinerja keuangan mengarah kepada perbaikan, perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan strategis.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (1996), kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (*financial information*), yaitu informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi personel mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam rencana strategik, program dan anggaran perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan juga digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*Performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Berdasarkan uraian di atas, kinerja keuangan bank

merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank.

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Sedangkan penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik bank. Diharapkan dengan adanya kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada pihak intern maupun bagi pihak ekstern bank.

### **2.3.2 Pengetahuan Dasar Perbankan**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pengertian bank menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menurut jenis kegiatannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Bank Umum

Bank umum atau yang biasa dikenal dengan nama bank komersial adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan sifat jasa yang diberikan adalah umum, yaitu memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan hal penting dan utama bagi bank dalam menjalankan kegiatannya. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Menurut Kartika (2006) perolehan dana bank yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya bersumber dari :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, merupakan dana dari modal sendiri yang berasal dari modal sendiri atau modal setoran yang berasal dari para pemegang saham. Secara garis besar dana sendiri diperoleh dari :
  - a. setoran modal pemegang saham
  - b. cadangan bank (laba tahun lalu)

- c. laba bank yang belum dibagikan (modal sementara)
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber ini. Sumber dana ini cukup mudah diperoleh dengan memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya.  
Contoh sumber dana ini :
  - a. Giro
  - b. Tabungan
  - c. Deposito
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya, merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Biasanya dana ini relatif lebih mahal dan siftnya hanya sementara waktu. Peroleh dana ini antara lain :
  - a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia, merupakan kredit dari Bank Indonesia bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
  - b. Pinjaman Antar Bank (*call money*), biasanya dilakukan bank jika mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
  - c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri
  - d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini bank yang menerbitkan SBPU yang kemudian diperjualbelikan pada pihak yang berminat.

### **2.3.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan**

Tingkat keberhasilan sebuah kinerja perusahaan dapat diketahui dari evaluasi atau penilaian kinerja. Anwar (2006, h.47) menyatakan bahwa "Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam perusahaan". Umar (2003, h.36) menyatakan bahwa "Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh".

Menurut Mulyadi (2001) dalam Hardikasari (2011), Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personelnnya, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi.

Evaluasi bank umum ada kaitannya dengan risiko usaha yang dihadapi oleh perbankan. Risiko-risiko usaha tersebut dapat dikelola dengan baik, dengan mengevaluasi kinerja perbankan. Berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. Ketentuan penerapan manajemen risiko untuk semua jenis risiko tidak semua berlaku bagi setiap bank. Bank yang memiliki ukuran dan

kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi suatu bank memiliki kinerja yang baik atau tidak, serta masalah-masalah apa yang akan diperkirakan akan dihadapi, maka evaluasi kinerja bank umum dilakukan dengan menghitung rasio-rasio finansial.

Terdapat beberapa alat atau metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, namun dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan perbankan maka kinerja keuangan diproyeksi dengan *Cash Flow Return On Asset* (CFROA). Dasar yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan. Menurut Kieso dan Weygandt (1995) dalam Hardikasari (2011) laporan keuangan yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi, namun laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Sedangkan laporan arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Menurut Pradhono (2004) dalam Hardikasari (2011) arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan dan juga beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan. *Cash flow return on assets* (CFROA) menurut Cornet, *et al* (2006) dalam Hardikasari (2011) digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi, dengan menggunakan CFROA maka akan dapat

lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini karena CFROA tidak terikat dengan harga saham

Sebenarnya selain menggunakan CFROA, rasio-rasio finansial yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perbankan sangat banyak dan bervariasi. Menurut Djarwanto (2004, h.143), yang dimaksud dengan ‘rasio’ dalam analisis laporan keuangan adalah “suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis sederhana.”. Umumnya berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank dikelompokkan ke dalam tiga (3) tipe dasar :

1. Rasio Likuiditas, yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain sebagai berikut :
  - a. *Cash Asset Ratio*, yaitu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Semakin tinggi tingkat rasio ini, maka semakin tinggi juga kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, namun dalam prakteknya akan dapat mempengaruhi profitabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah alat liquid yang dimiliki bank dengan pinjaman yang harus segera dibayar.
  - b. *Reserve Requirement (RR)*, yaitu likuiditas wajib minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bankm Indonesia. *Reserve*

*requirement* merupakan ketentuan bagi masing-masing bank untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

- c. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan Bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.
  - d. *Loan to Asset Ratio* (LAR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.
2. Rasio Rentabilitas, yaitu alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula dipakai untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Beberapa risiko rentabilitas antara lain :

- a. *Return On Asset* (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan asset.
  - b. *Return On Equity* (ROE), yaitu perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Kenaikan dalam rasio ini, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.
  - c. Rasio Beban Operasional (BOPO), yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatannya.
  - d. *Net Profit Margin* (NPM), adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan bank, dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.
3. Rasio Solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditasi bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai hutang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank.
- Rasio solvabilitas itu terdiri atas :

- a. *Capital adequacy ratio* (CAR), adalah rasio yang memperlihatkan sejumlah jauh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat dan pinjaman (hutang). Dengan kata lain, CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko.
- b. *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari dana bank sendiri. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya hutang.

Penggunaan analisis rasio bertujuan untuk menentukan tingkat kinerja suatu bank. Perhitungan rasio di atas, digunakan untuk menilai posisi kinerja suatu bank, memberikan gambaran yang jelas tentang baik atau tidaknya kegiatan operasional suatu bank, yang dapat dilihat dari posisi keuangannya dalam neraca dan laba-rugi yang terdapat dalam laporan keuangan bank tersebut.

### **2.3.4 Tujuan Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan**

Evaluasi kinerja keuangan perbankan bertujuan untuk mengetahui kesehatan dan prospek perbankan secara keseluruhan di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja keuangan perbankan dibutuhkan untuk melindungi pihak-pihak yang terkait, yaitu pemilik bank itu sendiri, para pengelola, masyarakat pengguna jasa bank, dan pemerintah, khususnya bank sentral.

Perbankan yang mempunyai kinerja yang baik dan sehat merupakan aset utama dalam menopang daya tahan perekonomian nasional dan dapat bersaing secara global. Apabila suatu negara mempunyai suatu sistem perbankan yang baik dan sehat, maka dapat memberikan keuntungan kepada pemerintah maupun bank sentral. Dalam hal ini, bank sentral mempunyai mitra yang dapat dijadikan pegangan dan dapat diandalkan dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter dalam suatu negara. Selain pemerintah dan bank sentral, pihak lain yang terkait yang mendapat keuntungan atau manfaat dari kinerja keuangan perbankan yang baik adalah masyarakat pengguna jasa perbankan itu sendiri. Masyarakat pengguna jasa bank dapat lebih meningkatkan kegiatan alokasi dananya tanpa harus khawatir akan kehilangan dananya yang telah dialokasikan ke dalam bank tersebut. Selain bagi masyarakat pengguna jasa bank, manfaat juga didapatkan oleh para pemilik modal dalam bank tersebut. Kinerja keuangan perbankan yang baik dan sehat merupakan salah satu bukti bahwa investasi yang mereka tanamkan tidak akan sia-sia.

Secara khusus, tujuan evaluasi kinerja keuangan perbankan mengandung beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan suatu bank terutama ditinjau dari kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai selama tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu bank dalam mendayagunakan asset yang dimiliki dalam profit secara efisien.
3. Untuk mengetahui apakah bentuk strategi implementasi peningkatan kinerja yang dipakai sudah cukup efektif dan efisien.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyana (1997) dalam Sari (2010) terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada periode 1990-1993 dengan indikator EVA, MVA dan ROA untuk mengukur kinerja saham menunjukkan bahwa EVA belum banyak digunakan oleh para investor baik domestik ataupun asing. Hasil korelasi antara EVA dengan MVA pada perusahaan-perusahaan yang listed di BEJ tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Penelitian Rosyana menyebutkan bahwa di Indonesia indikator ROA merupakan pengukuran umum terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan belum efisiennya pasar modal Indonesia, para investor belum sepenuhnya menggunakan informasi yang tersedia untuk menganalisis saham, sehingga harga saham yang terjadi belum mencerminkan informasi yang ada.

Kang dan Asghar (2000) dalam Sam'ani (2008) dalam penelitiannya ditemukan bukti bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara struktur

kepemimpinan dewan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on investment* (ROI).

Klapper dan Love (2002) dalam Sari (2010) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan Tobin's Q. Penemuan penting lainnya adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

Lastanti (2004) dalam Sabrina (2010) meneliti hubungan antara struktur *corporate governance* dengan kinerja dan reaksi pasar. Dalam penelitian tersebut digunakan struktur *corporate governance* berupa komposisi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi oleh nilai perusahaan (Tobin's Q) dan kinerja keuangan (ROA&ROE). Hasil penelitian menyatakan terdapat hubungan positif signifikan antara independensi dewan komisaris dan Tobin's Q. Sementara variabel lain tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap Tobin's Q, ROA dan ROE.

Ana (2004) dalam Sam'ani (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *Economic Value Added*. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah mekanisme monitoring organisasi (rangkap

kepemimpinan dewan direksi dan dewan komisaris, serta proporsi komisaris independen), mekanisme insentif manajemen (kompensasi manajemen), dan mekanisme struktur kepemilikan (kepemilikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, dan institusional).

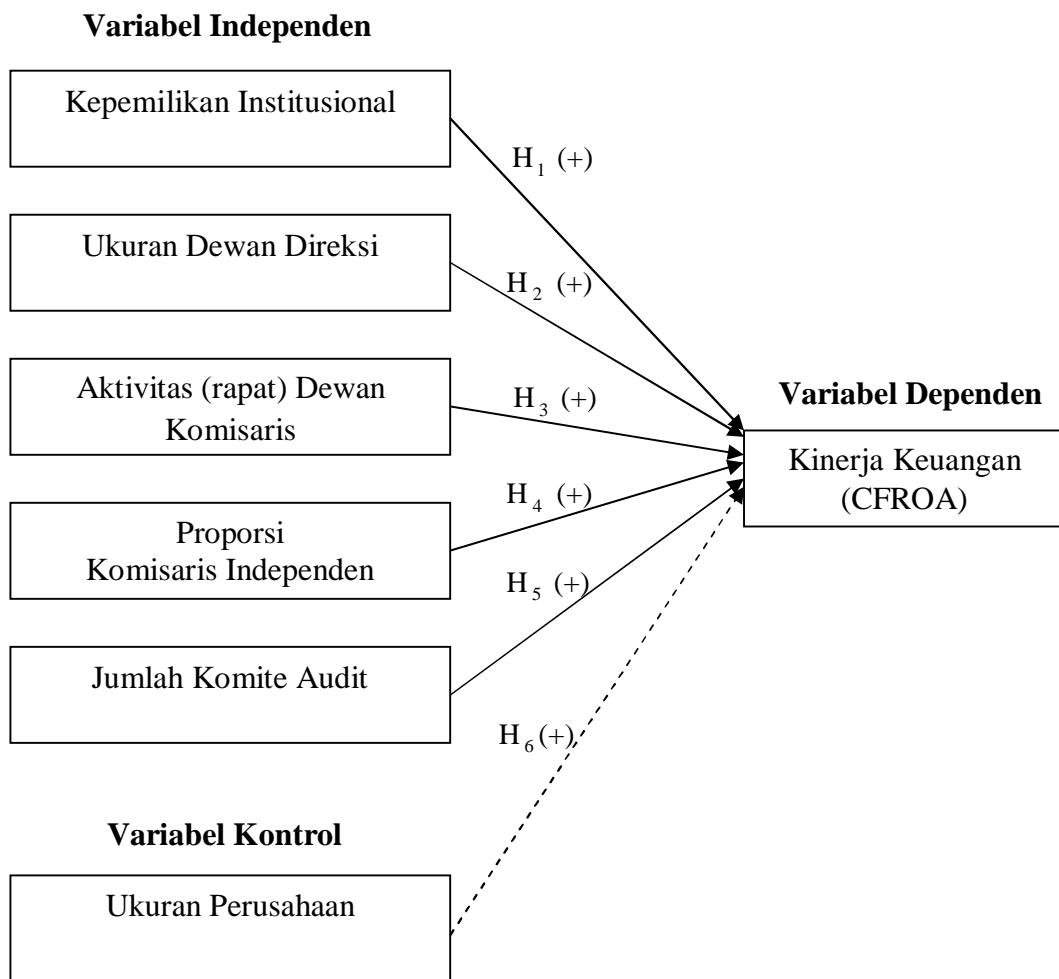
Hastuti (2005) dalam Sari (2010) menguji tentang *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Variabel *corporate governance* yang digunakan adalah *transparency* dan *accountability*. Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya korelasi tentang struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, tidak adanya korelasi tentang akuntabilitas dengan kinerja perusahaan dan terdapat hubungan yang signifikan tentang transparansi dengan kinerja perusahaan.

Darmawati, dkk (2005) dalam Sabrina (2010) menggunakan indeks CGPI tahun 2001 dan 2002 dalam penelitiannya yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Kinerja diukur dengan menggunakan dua pengukuran yaitu kinerja operasi yang diukur dengan menggunakan proksi *Return On Equity* (ROE)

dan kinerja pasar yang diukur menggunakan proksi Tobin's Q dengan menggunakan variabel kontrol yaitu komposisi aktiva, *growth opportunity* dan ukuran perusahaan. Darmawati, dkk (2005) menemukan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja operasi (ROE) tetapi secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar (Tobin's Q).

## 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan review penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator *corporate governance* dalam suatu perusahaan perbankan, yaitu : ukuran Dewan Direksi, aktivitas (rapat) Dewan Komisaris, kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, komite audit, dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan perbankan. Alat yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan perbankan tersebut adalah CFROA. CFROA dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan aktiva di dalam perusahaan perbankan tersebut untuk menghasilkan laba operasi. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



## 2.6 Perumusan Hipotesis

### 2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan institusional menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) dalam Adi (2011) merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang

dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan.

Menurut Kartikawati (2007) kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Hasil penelitian Kartikawati (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Shien, *et al* (2006) dalam Winanda (2009) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen perusahaan karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham karena pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Menurut Widjaja dan Kasenda (2008) dalam Saffudin (2011) tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost*.

Bathala, *et al* (1994) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Keberadaan investor institusional di dalam perusahaan dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap kinerja manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Menurut Gunarsih (2004) hal ini disebabkan tingginya hak voting yang dimiliki manajer. Dengan adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen, maka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Moh'd, *et al.* (1998) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu investor institusional dan *shareholders dispersion* dapat mengurangi *agency costs*. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi

dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

### **2.6.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006 menyatakan bahwa Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Mizruchi (1983) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) menjelaskan bahwa Dewan Direksi merupakan pusat pengendalian di dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Dewan Direksi merupakan faktor penentu terbentuknya kebijakan yang akan diambil perusahaan, selain itu Dewan Direksi juga yang menentukan strategi apa yang akan diambil perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang.

*Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isshaq, *et al* (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara *board size* dengan kinerja perusahaan.

S. Beiner, *et al* (2003) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan institusi ekonomi yang membantu memecahkan permasalahan agensi yang melekat dalam perusahaan publik. Menurut Adrian Cadbury dalam *Cadbury Committee* (1992) dewan direktur bertanggung jawab pada komisaris perusahaan mereka.

Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Menurut Pfeffer (1973) dan Pearce dan Zahra (1992) dalam Faisal (2005) bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Hal ini didukung oleh pendapat Alexander, Fernell, Halporn (1993) dan Goodstein, Gautarn, Boeker (1994) dalam Wardhani (2006) yang menyatakan jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola

sumber dayanya secara lebih baik. Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **2.6.3 Pengaruh Aktivitas (rapat) Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006 mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *corporate governance*, karena Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan Dewan Direksi. Peran Dewan Komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara Dewan Direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu Dewan Komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja Dewan Direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap

kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah rapat yang dibuat ditanda-tangani Pimpinan rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Menurut Juwitasari (2008) semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka akses informasi juga akan semakin merata di antara sesama komisaris, sehingga keputusannya semakin baik yang berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu sumber informasi yang nantinya digunakan untuk meningkatkan efektifitas dewan komisaris. Informasi yang diungkapkan melalui rapat tersebut meliputi tidak hanya pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, pengendalian internal tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Vafeas (1999) ditemukan hubungan positif antara frekuensi rapat dengan kinerja perusahaan. Hal ini juga dikemukakan oleh Perry (1996), aktivitas Dewan Komisaris mengukur kualitas dari peran monitoring-nya. Semakin aktif Dewan Komisaris, maka kinerja perusahaan juga akan semakin efektif. Selain itu, Vafeas (1999) dalam Juwitasari (2008) menyimpulkan bahwa aktivitas *board* merupakan dimensi penting dan bahwa frekuensi rapat yang dilakukan memiliki hubungan dengan kinerja operasi perusahaan. Hal ini sesuai dengan Coger, *et al* (1998) bahwa frekuensi rapat merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektifitas dari Dewan

Komisaris. Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub> : Aktivitas (rapat) Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. H<sub>2</sub>

#### **2.6.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. komposisi Dewan Komisaris Independen diukur berdasarkan presentase jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan Dewan Komisaris perusahaan.

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. FCGI (2003) menyatakan bahwa “Komisaris Independen memiliki peranan penting dalam memonitor perusahaan.” Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Menurut FCGI (2003) Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Penelitian mengenai dampak dari proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ayuso dan Argondana (2007) dalam Santoso (2012) menyatakan bahwa Komisaris Independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Menurut Fama dan Jansen (1983) dalam Santoso (2012) Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Pathan, Skully, dan Wickramanayake (2007) dalam Santoso (2012) menyimpulkan terdapat pengaruh signifikan positif antara proporsi Komisaris Independen dengan kinerja perbankan.

Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. dalam penelitian yang dilakukan oleh Yermack (1996); Daily dan Dalton (1993); Stearnns dan Mizruchi (1993) menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan pemaparan diatas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub> : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

#### **2.6.5 Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Keberadaannya diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam kerangka dasar *corporate governance*, implementasi prinsip-prinsip *corporate governance* tergantung atas tiga pilar penting, yaitu *internal control* yang kuat, audit internal yang independen dan audit eksternal yang memberikan *feedback* terhadap efektifitas dari proses internal control yang ada di dalam perusahaan. Untuk menunjang keefektifan ketiga pilar tersebut, peran Komite Audit sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris juga harus efektif dan dioptimalkan.

Menurut Bradbury, *et al* (2004) komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Menurut Bradbury, *et al* (2004) di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal.

Tugas komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006 adalah :

- a. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
- b. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- c. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh

Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

- Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
- Anggota komite audit yang berasal dari komisaris, hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.

Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen.

McMullen (1996) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Sam'ani (2008) komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu:

(1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya, sehingga akan mengurangi terjadinya masalah keagenan di dalam perusahaan. Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_5$  : Jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

#### **2.6.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Sujoko dan Soebiantoro (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang tercermin dari nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun yang diukur dengan  $\ln$  dari total aktiva. Sehubungan dengan total aktiva, apabila perusahaan memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan (*maturity*) atau *well established*. Menurut Sembiring (2008) secara umum perusahaan yang mempunyai total aktiva yang relatif besar dapat beroperasi

dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivasnya lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan dengan total aktiva yang besar akan lebih mampu untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

Menurut Sawir (2004) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda. Beberapa alasan adalah sebagai berikut :

1. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan.
2. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang.

3. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada akhirnya, ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem manajemen.

Menurut Machfoedz (1994) ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan penjualan, total aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkorelasi tinggi. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan akan pendanaan yang lebih besar memiliki kecenderungan bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan dalam laba. Fama dan French (1992) dalam Xu (2003) menyatakan bahwa kebutuhan dana yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan laba dan juga pertumbuhan tingkat pengembalian saham. Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_6$  : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari lima variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen) dan satu variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, aktivitas dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit. Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan, sedangkan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.

##### **3.1.1 Variabel Independen**

Variabel Independen dalam penelitian ini meliputi :

###### **1. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Persentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada

di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.

## 2. Ukuran Dewan Direksi

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006 menyatakan bahwa Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Ukuran Dewan Direksi diukur dengan menggunakan jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jumlah anggota Dewan Direksi dalam suatu perusahaan paling sedikit 3 orang.

## 3. Aktivitas (rapat) Dewan Komisaris

Menurut FCGI (2002) dalam Ratnasari (2011) rapat dewan komisaris merupakan pertemuan antara anggota dewan komisaris yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, akan dibahas tentang strategi perusahaan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil oleh manajemen. Jumlah rapat dewan komisaris diukur berdasarkan total rapat yang dilaksanakan secara intern antar dewan komisaris perusahaan pada tiap tahunnya.

## 4. Proporsi Komisaris Independen

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) 2004 menyatakan bahwa Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi Komisaris Independen diukur berdasarkan persentase (%) antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris.

#### 5. Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit.

### 3.1.2 Variabel Dependen

#### 1. Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan perusahaan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA). CFROA dihitung dari laba sebelum pajak dan ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah peningkatan atau penurunan kinerja keuangan perusahaan.

### 3.1.3 Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan perbankan yang diprosikan dengan logaritma natural dari total *asset* yang dimiliki bank. Menurut Mayur dan Saravanan (2008) dalam Oktapiyani (2009) dalam

pasar produk, *size* menggambarkan kemungkinan mencapai skala ekonomis. Selain itu *size* menggambarkan kekuatan pasar dari bank bersangkutan.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Ada beberapa pengertian populasi menurut para ahli, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Nawawi (1983, h.144) populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik berupa hasil perhitungan maupun ukuran, kuantitatif maupun kualitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas.
2. Menurut Arikunto (2002, h.108) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.
3. Menurut Sugiyono (2002, hal.55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Selain terdapat beberapa pengertian populasi yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat juga beberapa pengertian sampel yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. Menurut Arikunto (2002, hal.109) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita

bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

2. Menurut Nawawi (1997, hal.44) sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penulisan, sebagian individu yang diselidiki itu sebagai sampel atau contoh.
3. Menurut Suparman (1989, hal.5-7) sampel adalah pendekatan bersifat analisis kuantitatif yaitu mengumpulkan data dengan cara mencacah dan pengukuran dengan menggunakan satuan hitungan. Dengan demikian data yang dikumpulkan dapat dibuat klasifikasi secara kuantitatif.
4. Menurut Hasan (2002, hal.58) sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Dengan kata lain sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dapat diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan yang sudah *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011.
2. Masih beroperasi hingga tahun 2011.

3. Bank mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 Desember 2009-2011 di dalam website Bursa Efek Indonesia.
4. Data diungkapkan secara lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan maupun data yang diperlukan untuk menghitung kinerja keuangan perusahaan.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data historis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2010, hal.137) mendefinisikan data sekunder adalah sebagai berikut :

“Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.”

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, data tersebut didapat melalui media perantara dari berbagai sumber yang tersedia. Data tersebut diperoleh dari buku-buku referensi, literatur dan data yang dapat diambil dari Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan (*annual report*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2011 yang dapat dilihat dari situs resminya yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) website Bank Indonesia serta Indonesian Capital Market Directory (ICMD) periode 2009-2011.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Metode dokumenter dapat dilakukan dengan cara mempelajari dokumen serta catatan-catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan *corporate governance* serta kinerja keuangan pada perusahaan, khususnya perusahaan perbankan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang berisi tentang data-data annual report yang mencakup data *corporate governance*. Data-data mengenai *corporate governance* antara lain berisi tentang ukuran dewan direksi, aktivitas dewan direksi, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional untuk periode 2009-2011.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, aktivitas dewan direksi, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Deskripsi variabel tersebut disajikan untuk mengetahui nilai-nilai (mean) minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Oktapiyani (2009) dalam Sari (2010) mean digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang dianalisis. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan di sektor perbankan.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, harus dilakukan uji klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

#### **a. Uji Multikolonieritas**

Menurut Ghozali (2006, hal.95-96) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari tolerance dan lawannya dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model ini adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R<sup>2</sup> sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b. Menganalisis matrik korelasi antar variabel independen jika terdapat korelasi antar variabel independen yang cukup tinggi ( $> 0,9$ ) hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- c. Dilihat dari nilai VIF dan Tolerance. Nilai *cut off* Tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$  (berarti terdapat multikolonieritas).

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (*DW test*). Uji DW dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan. Kriteria pengujian dengan hipotesis tidak ada autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Uji Durbin-Watson (*DW test*)**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < DW < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq DW \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < DW < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq DW \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$Du < DW < 4 - du$

Sumber : Ghozali (2005)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara variabel dependen (terikat) dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji Park maupun Uji Glejser (*Glejser Test*), yaitu dengan melakukan analisis regresi variabel independen terhadap nilai absolute residual. Dalam uji Glejser yaitu jika tingkat signifikansi diatas 5% atau jika  $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ , maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Namun bila tingkat signifikansi di bawah 5% atau  $t \text{ hitung} < t \text{ table}$ , maka ada gejala heterokedastisitas.

d. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2001).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Menurut Ghozali (2001) jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

### 3.5.3 Analisa Regresi

Menurut Gujarati (2003) analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Menurut Tabachnick (1996) hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus : pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode penggabungan (*pooling data*) merupakan model yang diperoleh dengan mengkombinasikan atau mengumpulkan semua data *cross section* dan data *time series*. Model data ini kemudian diestimasi dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Analisis regresi linear berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. *Pooling data* atau data panel dilakukan dengan cara menjumlahkan perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode pengamatan.

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{CFROA} = \beta_0 + \beta_1 \text{BOD} + \beta_2 \text{RDK} + \beta_3 \text{INST} + \beta_4 \text{INDEP} + \beta_5 \text{KA} + \beta_6 \text{SIZE} + e$$

Keterangan :

CFROA = Cash Flow Return On Asset

$\beta_0$  = Konstanta

BOD = Ukuran Dewan Direksi

RDK = Aktivitas (rapat) Dewan Komisaris

INST = Kepemilikan Institusional

INDEP = Proporsi Komisaris Independen

KA = Komite Audit

SIZE = Ukuran Perusahaan

$\beta_1 - \beta_6$  = Koefisien regresi

e = *error*

Penelitian ini bersifat *fundamental method*, oleh karena itu nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis. Terdapat kesimpulan yaitu apabila jika koefisien  $\beta$  bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Setiap kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian pula sebaliknya, apabila koefisien  $\beta$  bernilai negatif (-), maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen.

### 3.6 Pengujian Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai satu atau beberapa populasi. Secara umum dapat dibedakan hipotesis atas hipotesis riset dan hipotesis statistik. Hipotesis riset adalah hipotesis yang dirumuskan oleh seorang peneliti ahli (sample surveyor atau experimenter) yang biasanya bukan seorang ahli statistika. Sedangkan hipotesis statistik adalah hipotesis yang dirumuskan dengan statistika. Ada dua macam hipotesis statistik, yakni hipotesis nol yang dinotasikan dengan  $H_0$  dan hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif yang dinotasikan dengan  $H_a$  atau  $H_1$ .

Untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji ketepatan perkiraan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Menurut Ghazali (2009) perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak. Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Definisi khusus ini memiliki penafsiran yang valid apabila model regresi mengandung konstanta. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang paling kecil berarti

kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Menurut Ghazali (2009) secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Penggunaan koefisien determinasi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari penggunaan koefisien determinasi ini adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi. Setiap tambahan satu variabel dependen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted  $R^2$  (koefisien determinasi disesuaikan) pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Menurut Ghazali (2009) nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model regresi.

Nilai adjusted  $R^2$  adalah koefisien determinasi yang mempertimbangkan derajat bebas. Derajat bebas besarnya tergantung dengan banyaknya variabel independen. Koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted  $R^2$ ) digunakan untuk membandingkan 2 model regresi apabila banyaknya variabel independen tidak sama. Misal model regresi 1 memiliki variabel independen sebanyak 4 buah dan model regresi 2 memiliki variabel independen sebanyak 5 buah.

Apabila kita membandingkan 2 model regresi berdasarkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) maupun koefisien determinasi disesuaikan (adjusted  $R^2$ ) harus hati-hati. Hal ini karena tujuan menaksir model regresi bukan semata-mata mencari besarnya nilai koefisien determinasi maupun nilai koefisien determinasi disesuaikan namun yang lebih penting adalah mendapatkan taksiran yang menyakinkan mengenai koefisien-koefisien regresi yang mencerminkan populasi yang sebenarnya dan menarik inferensi. Berkaitan dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ) ada berbagai kemungkinan, yaitu :

1.  $R^2$  dan hanya beberapa koefisien yang regresi (beta) yang signifikan.
  2.  $R^2$  mungkin signifikan tetapi tidak ada satupun koefisien regresi (beta) yang signifikan.
  3.  $R^2$  semua koefisien regresi (beta) mungkin signifikan tetapi  $R^2$  tidak signifikan.
  4. Semua koefisien regresi (beta) dan  $R^2$  mungkin tidak signifikan.
- b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2006, hal.163) uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = b_6 = b_7 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama.
2.  $H_0 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq b_6 \neq b_7 \neq 0$ , artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama.

Pengujian hipotesis ini sering disebut pengujian signifikansi keseluruhan (overall significance) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan dengan kedua X1 dan X2. Joint hipotesis dapat diuji dengan teknis analisis variance (ANOVA).

*Analysis of variance* atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rerata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametric. Ghazali (2009) menyatakan bahwa “sebagai alat statistika parametric, maka untuk dapat menggunakan rumus ANOVA harus terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas, heterokedastisitas dan random sampling”. Analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif yaitu menguji variabel dependen dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Uji simultan dikatakan signifikan apabila:

1. Nilai F hitung  $>$  F tabel

F hitung dapat diperoleh melalui uji manual (menghitung sendiri) ataupun melalui hasil pengolahan data seperti SPSS (pada tabel ANOVA dengan nama F). Sedangkan F tabel diperoleh hanya melalui uji manual dengan melihat nilai pada tabel F.

2. Signifikansi F  $<$  derajat kepercayaan penelitian (0,05 pada umumnya)

Nilai signifikansi dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan spss (pada tabel ANOVA dengan nama sign). Apabila nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dikatakan sangat signifikan.

Penentuan besarnya  $F_{hitung}$  menggunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2)(n - k)}$$

Keterangan :

R = koefisien determinan

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ . Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Ghozali (2005) menyatakan bahwa “uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen”. Apabila nilai probabilitas signifikansi  $< 0.05$ , maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_0 = b_1 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
2.  $H_0 = b_1 \neq 0$ , artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

1. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_i = 0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut), dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t hasil perhitungan dengan titik kritis menurut tabel..

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ . Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Untuk menilai t hitung digunakan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\text{koefisien regresi } b_1}{\text{standar deviasi } b_1}$$